

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Gerakan sosial yang dipakai Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat merupakan suatu bentuk jaringan taktis yang dijelaskan melalui kerangka teori gerakan sosial baru (GSB) yang terdiri dari beberapa lembaga non pemerintah dan individu. JPP SUMBAR menjadi aliansi gerakan yang *consent* terhadap isu diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan JPP SUMBAR dalam mendesak pengesahan RUU P-KS dalam penelitian ini berpedoman kepada beberapa konsep dan teori gerakan sosial.

Untuk mengidentifikasi lembaga yang tergabung dalam JPP SUMBAR, peneliti menggunakan konsep analisis stakeholder engagement. Sedangkan untuk informasi mengenai bentuk strategi gerakan JPP SUMBAR dalam mengemas isu RUU P-KS, peneliti berpedoman Teori Proses Politik dari Douglas McAdam. Dalam praktiknya McAdam mengatakan yakni ada tiga faktor determinan yang mampu mendesak keberhasilan suatu gerakan sosial yang dilakukan JPP SUMBAR, yaitu: (1) *Organization strength*; (2) *cognitive liberation*; dan (3) *political opportunities*.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan oleh JPP SUMBAR meliputi sidang rakyat se-Indonesia menjadi strategi yang menarik sebagai bentuk pertarungan wacana dengan pihak yang menolak RUU P-KS serta mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU P-KS. Upaya strategis tersebut membantu dalam

---

<sup>1</sup> Sukmana Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. Hlm 192

melegitimasi kegiatan framing dari stakeholder sebagai pelaku gerakan sosial untuk menguasai wacana di Sumatera Barat.

Dalam memasifkan isu, juga diadakan open mic “Sumatera Barat berbicara pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, kegiatan diadakan oleh 24 lembaga mulai dari anak muda, perempuan nelayan, kelompok lintas iman, kelompok film, pegiat kesetaraan gender, dan lainnya.

Kelemahan pengorganisasian terdapat pada kekuatan eksternal sebagai *political opportunities* dengan tokoh politisi, agama. Mengingat Sumatera Barat adalah daerah yang dianggap religius, peran dari tokoh agama sangat berpengaruh untuk mengedukasi masyarakat. Namun, dalam pertarungan wacana, belum ada pertemuan antara mereka yang menolak dan mendukung RUU P-KS untuk menciptakan konfrontasi ide. Sehingga yang terjadi hanyalah penguatan jaringan dari masing-masing kelompok untuk menguasai wacana di Sumatera Barat.

#### **4.2 Saran**

Temuan-temuan yang dipaparkan peneliti merupakan bukti bagaimana stakeholder di JPP SUMBAR dalam mengemas isu kekerasan seksual di Sumatera Barat dan mendesak pengesahan RUU P-KS. Peneliti akan memberikan beberapa saran untuk permasalahan pro dan kontra dalam memahami RUU P-KS di Sumatera Barat sebagai payung hukum mengatasi kekerasan seksual.

#### **Bagi Pemerintah**

1. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya RUU P-KS untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia.

2. Mendesak DPR-RI sebagai pemangku kebijakan untuk segera mengesahkan RUU P-KS

3. Menjembatani pihak pro dan kontra agar tercapainya sebuah kesamaan ide

**Bagi Stakeholder JPP SUMBAR**

1. Membangun jaringan dengan tokoh agama, budayawan, akademisi, politisi yang mempunyai perspektif gender

2. Tetap konsisten dalam menyuarakan isu kekerasan seksual dan mengawal pengesahan RUU P-KS

